



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

- Nama : M. SYAIFUDIN ZUHRI
- Jabatan : KEPALA DINAS
- NHK : 681688

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.275.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 450 m²/128 m² di LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000
- Tanah Seluas 360 m² di LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
- Tanah Seluas 375 m² di LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 108 m²/45 m² di LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 107 m²/45 m² di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 166.000.000

- MOTOR, YAMAHA 54P (CAST WHEEL) A/T / SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
- MOBIL, HONDA BRIO SATYA E CVT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
- MOTOR, HONDA SCOOPY / F1C02N46LO A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 55.470.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 177.148.596

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.673.618.596

III. HUTANG Rp. 170.030.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.503.588.596

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.